

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Tionghoa di Indonesia merupakan kelompok etnik yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia jauh sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Bahkan setelah terbentuknya negara ini, warga negara Indonesia yang berasal dari suku bangsa Cina (Tionggok) diakui dan dianggap setara dengan suku bangsa lainnya. Sejarah menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia banyak yang merupakan keturunan dari orang-orang Tionggok yang berhijrah secara berkala dan bergelombang dari Tionggok selama ribuan tahun.<sup>1</sup> Orang-orang Tionggok atau Cina di Indonesia dipanggil “Tionghoa”, sebuah istilah yang diciptakan sendiri oleh orang-orang yang berasal dari Tionggok di Indonesia. Tionghoa adalah istilah bahasa Indonesia yang khas. Secara penggunaan bahasa, Istilah Cina dirasa mengarah pada bentuk hinaan dan masyarakatnya sendiri lebih senang menggunakan istilah Tionghoa. Alasan peneliti menulis tentang Kehidupan Sosial Keagamaan Muslim Tionghoa di Kota Bandung 1966-2020, dimana dalam peristiwa tersebut terlihat jelas bagaimana pasang surut kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia dari waktu ke waktu sesuai dengan kehidupan dalam pergantian sistem pemerintahan.

Di Indonesia, komunitas muslim Tionghoa memiliki sejarah yang cukup tua, yang dapat terkonfirmasi melalui jejak sejarah yang mencatat keberadaan mereka bahkan sebelum Indonesia merdeka. Catatan sejarah tersebut dapat ditemukan dalam karya Ma Huan, yang menemani Cheng Hoo selama tiga dari tujuh pelayaran saat mengunjungi Trowulan. Dalam catatannya, Ma Huan berhasil mencatat tiga strata sosial masyarakat yang hadir pada masa itu.<sup>2</sup>

Menurut Benny G Setiono, sekitar abad ke 14 di Jakarta (dulu Sunda Kelapa) telah ditemukan penduduk dengan bermata rata-rata sipit dan berkulit putih. Dan pada abad ke 16 terjadi migrasi besar-besaran ke daerah Jawa. Rata-rata alasan

---

<sup>1</sup> Choirul Mahfud, *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013) hlm.50.

<sup>2</sup> Perkasa, Adrian. *Orang-Orang Tionghoa Dan Islam Di Majapahit*. (Yogjakarta: Pustaka Ombak. 2012)

meninggalkan negeri mereka karena ekonomi dan perang yang terus terjadi.<sup>3</sup> Lantas siapakah orang Tionghoa itu?. Banyak jawaban yang dapat menjelaskannya, menurut peneliti sendiri adalah orang Tionghoa yang mampu berbicara bahasa mandarin dan mempunyai darah keturunan dari Tionghoa. Masyarakat Tionghoa terbagi menjadi dua kelompok, yaitu peranakan dan totok. Peranakan merujuk kepada individu Tionghoa yang bermigrasi ke Jawa, khususnya laki-laki, dan kemudian menikah dengan wanita setempat, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Kelompok ini, bersama dengan generasi sebelum Perang Dunia II, umumnya menetap di Jawa dan beberapa wilayah di luar Jawa.<sup>4</sup>

Teori Cina menyatakan bahwa penyebaran Islam di Indonesia, terutama di Jawa, berasal dari perantau Cina. Hubungan antara orang Cina dan masyarakat Indonesia telah terjalin jauh sebelum Islam diperkenalkan di Indonesia. Selama periode Hindu-Budha, komunitas etnis Cina atau Tiongkok telah berinteraksi dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kegiatan perdagangan. Bahkan, ajaran Islam sudah mencapai Cina pada abad ke-7, ketika agama ini masih dalam tahap perkembangan awal.<sup>5</sup> Fakta-fakta yang tersedia hingga saat ini menunjukkan bahwa pengaruh Islam yang berasal dari Cina tidak begitu besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Lebih lanjut, sebagian besar warga Tionghoa di Indonesia yang menganut Islam tidak secara otomatis menjadi Muslim karena asal-usul mereka, tetapi lebih disebabkan oleh pilihan batin. Hal ini menunjukkan bahwa warga Tionghoa di Indonesia memiliki kebebasan dalam memilih keyakinan agama mereka, dan banyak yang memilih untuk memeluk Islam atas dasar panggilan hati pribadi.

Secara geneologis ada 3 kelompok generasi Tionghoa Muslim. Generasi pertama *The Lost Chinese Muslim*. Generasi ini datang ke tanah Jawa pada abad ke 15 dan 16, mereka datang tanpa membawa istri-istri mereka sehingga melakukan perkawinan campuran dengan perempuan pribumi. Proses ini berlangsung terus menerus hingga melahirkan generasi yang hanya memiliki sedikit saja ciri-ciri rupa

---

<sup>3</sup> Victor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, Second Edition Oxford University Press (Kuala Lumpur, 1981) hlm. 465.

<sup>4</sup> Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Jakarta:Grafiti Pers, 1984) hlm. 86.

<sup>5</sup> Budijono, *Antara news*, 14 juli 2001.

Tionghoa, bahkan secara berangsur-angsur ciri-ciri tersebut hilang. Generasi kedua adalah orang-orang Tionghoa Muslim atau lahir dari kedua orang tua yang sama-sama Muslim atau lahir dari perkawinan campuran antara Tionghoa Muslim dan pribumi. Generasi ketiga adalah para imigran Tionghoa beserta keturunannya yang datang belakangan dan karena faktor tertentu kemudian masuk Islam (*new convert*).<sup>6</sup>

Menurut Budijono, populasi warga Tionghoa di Indonesia mencapai 15 persen dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 5 persen di antaranya menganut agama Islam. Perpindahan keyakinan warga Tionghoa ini menarik perhatian, karena biasanya jika satu keluarga memutuskan untuk berpindah keyakinan ke Islam, mereka dapat menghadapi pengucilan dari keluarga, bahkan dihapus dari daftar warisan keluarga, dan kemungkinan besar mengalami masalah di lingkungan sekitarnya. Sebagai akibatnya, mereka yang memilih berpindah keyakinan ke Islam harus menghadapi kenyataan keluar dari keluarga dan menjadi mandiri, baik secara ekonomi maupun sosial. Sementara menurut Junus Jahja, hanya sekitar 0,5 persen dari keseluruhan populasi Tionghoa di Indonesia yang memeluk agama Islam pada sekitar tahun 1970-an.

Dalam karya William G. Skinner, Orang Tionghoa didefinisikan melalui konsep identifikasi sosial, di mana individu bertindak sebagai anggota dari dan mengidentifikasi dirinya dengan masyarakat Tionghoa. Selain itu, Skinner juga menyatakan bahwa satu-satunya ciri budaya yang dapat digunakan untuk menentukan ke-Tionghoan seseorang adalah melalui penggunaan nama Tionghoa.<sup>7</sup> Definisi Skinner tersebut menjadi sebuah tolak ukur pada masanya untuk mendefinisikan ke-Tionghoan seseorang, yang mencakup pandangan bahwa "orang Tionghoa adalah imigran yang lahir di Tiongkok atau keturunan imigran yang datang terlebih dahulu melalui pihak laki-laki." Namun, Skinner berpendapat bahwa tolak ukur semacam ini tidak tepat karena tidak mencerminkan realitas yang ada di masyarakat. Skinner

---

<sup>6</sup> Afthonul Afif. *Identitas tionghoa muslim indonesia pergulatan mencari jati diri*. (Depok: Penerbit Kepik.2012)

<sup>7</sup> Willian G, Skinner, *The Cinese Minority dalam Ruth T. McVey (ed), Indonesia (New Haven:Southeast Asia Study, Yale University, 1963) hlm 97.*

merujuk pada kompleksitas identitas Tionghoa yang tidak hanya terbatas pada asal usul geografis atau garis keturunan laki-laki, tetapi juga melibatkan faktor-faktor sosial dan budaya yang lebih luas. Dengan demikian, definisi yang bersifat lebih inklusif dan memperhitungkan keragaman pengalaman individu dianggap lebih sesuai untuk menggambarkan ke-Tionghoan.

Dari masa kemasa, pemerintah Indonesia selalu memberikan perhatian khusus apabila menyangkut Etnis Tionghoa. Perhatian itu berupa kebijakan-kebijakan yang pada umumnya bersifat menyusahkan dan menyudutkan etnis Tionghoa sebagai minoritas. Pada zaman orde lama masa pemerintahan Soekarno, kondisi perpolitikan nasional tidak stabil dan mudah pecah. Tindakan diskriminatif yang masih terjadi terhadap etnis Tionghoa memicu muncul kembalinya isu untuk beasimilasi dan berintegrasi dikalangan etnis Tionghoa. Ong Hok Ham berpendapat bahwa salah satu jalan aialah asimilasi atau pelebuhan 100 persen.<sup>8</sup> Etnis Tionghoa mencari dukungan politik terhadap organisasi-organisasi yang dapat menunjang aspirasi politik mereka, seperti Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain itu mendukung presiden Soekarno dapat menjadi salah satu cara untuk menunjukkan eksistensinya etnis Tionghoa dipanggung politik nasional.

Charles A. Coppel dalam buku *Tionghoa dalam Krisis* mengatakan bahwa:

*Dikalangan minoritas Tionghoa kecenderungan ke kiri dan perkembangan politik Indonesia dan kebijakan luar negeri yang tampak tidak dapat ditawarkan lagi itu telah memperkuat argumentasi para pemimpin yang berkata bahwa jalan keselamatan bagi orang Tionghoa terletak pada dukungan dan antusias kepada Presiden Soekarno dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner.<sup>9</sup>*

Pasca terjadinya Gerakan 30 September (G 30 S) atau yang biasa disingkat G 30 S PKI, Indonesia mengalami gelombang anti-Tionghoa, terutama di Pulau Jawa. Orang-orang Tionghoa dianggap sebagai komunis dan pengikut Partai Komunis

---

<sup>8</sup> Ong Hok Ham. *Riwayat Tionghoa peranakan di Jawa*.(Depok:Komunitas Bambu 2017) hlm 157

<sup>9</sup> Charles A.Coppel,*Tionghoa Indonesia dalam Krisis*,Judul Asli : *Indonesia Chinese In Crisis*, Penerjemah Tim PSH (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1994) hlm. 35.

Indonesia (PKI). Gelombang anti-Tionghoa ini melibatkan aksi demonstrasi yang seringkali berujung pada pengrusakan dan penjarahan toko-toko serta rumah milik orang Tionghoa. Demonstrasi ini tidak hanya terbatas di Jakarta tetapi menyebar ke seluruh Indonesia, termasuk kota-kota seperti Makassar, Medan, dan Sukabumi.

Penting untuk dicatat bahwa peran militer dalam konteks ini semakin membesar, dengan Angkatan Darat memiliki pengaruh yang signifikan. Penguasa militer daerah juga mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan sendiri yang kadang bertentangan dengan peraturan pusat. Kejadian-kejadian tersebut mencerminkan ketegangan dan ketidakstabilan politik yang terjadi pasca-G 30 S PKI, yang berdampak pada kondisi sosial dan politik di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1966, pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian kebijakan yang menargetkan komunitas Tionghoa. Salah satunya adalah larangan peredaran surat kabar berbahasa Tionghoa. Pada tanggal 31 Desember 1966, diterapkan empat peraturan khusus untuk Warga Negara Asing (WNA) Tionghoa. Keempat peraturan tersebut melibatkan larangan perdagangan WNA Tionghoa di kota-kota besar di Jawa, pembatasan perpindahan domisili, penetapan pajak yang tinggi, serta larangan penggunaan huruf dan bahasa Tionghoa dalam berbagai konteks publik seperti percetakan, perdagangan, korespondensi, percakapan telepon, dan kegiatan berjualan. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan keputusan untuk menutup semua kelenteng di Jawa Timur dan Madura. Alasannya adalah untuk mempercepat proses integrasi sosio-kultural dan memutuskan kaitan kultural Tionghoa dengan nenek moyangnya. Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan suasana politik pada masa itu yang cenderung mengarah pada penekanan terhadap identitas Tionghoa di Indonesia.<sup>10</sup>

Kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto, yang dikenal sebagai Orde Baru (Orba), terkait dengan etnis Tionghoa dimulai dengan memutuskan hubungan diplomatik dan mengeluarkan serangkaian peraturan baru yang memperkuat aturan-aturan yang telah ada sebelumnya. Salah satu peraturan yang diimplementasikan adalah

---

<sup>10</sup> Setiono, Benny G. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. (Jakarta : Elkasa, 2002. Intan Dalam Debu volume 13.) hlm 804

Instruksi No. 45552.2-369/1968 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, yang melarang penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau memperbaharui Klenteng Tionghoa. Selain itu, Surat Edaran Menteri Penerangan No. 01/SE/Ditjen/PPG/K/1988 juga diterbitkan, yang melarang penerbitan dan percetakan tulisan atau iklan menggunakan huruf dan bahasa Tionghoa.

Pemerintah juga mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SKB-01-UM.09.30-80 No.42 yang mewajibkan setiap keturunan Tionghoa Indonesia dari berbagai usia untuk memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Pada aspek agama, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.447/74054/BA.01.2.4683/95 tanggal 18 November 1978 menetapkan bahwa agama yang diakui pemerintah adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.

Tak hanya itu, beberapa Peraturan Daerah (Perda) juga diimplementasikan, seperti Perda Tingkat I DKI Jakarta No K-I/OS/-11/OS-12 yang mengatur kewajiban orang Tionghoa untuk melapor dan mengisi formulir K-1. Keseluruhan kebijakan tersebut mencerminkan kontrol ketat pemerintah terhadap kehidupan dan identitas etnis Tionghoa di Indonesia selama periode Orde Baru.

Keruntuhan pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto meninggalkan sejumlah masalah yang sangat kompleks. Termasuk di antaranya adalah kehancuran sistem ekonomi, kemunduran moral bangsa, dan desakan politik yang memuncak dalam gerakan reformasi. Presiden BJ Habibie, yang kemudian diangkat menjadi Presiden Indonesia ketiga, dihadapkan pada warisan berat ini.

Kondisi tersebut melibatkan runtuhnya sistem ekonomi yang sudah mapan, permasalahan etika dan moral dalam masyarakat, serta tekanan politik yang memuncak dalam tuntutan reformasi. Isu-isu demokrasi dan kebebasan berekspresi menjadi tuntutan utama, bukan hanya dari aktivis pribumi, tetapi juga munculnya aktivis-aktivis Tionghoa yang turut berpartisipasi dalam gerakan ini.

Kenangan buruk selama pemerintahan Soeharto menciptakan dorongan untuk melupakan masa lalu dan menuntut persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan. Proses reformasi menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia, membuka ruang bagi pluralitas suara dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis-aktivis Tionghoa. Hal ini mencerminkan semangat untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil setelah era Orde Baru.

Ketika Presiden BJ Habibi lengser dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid. Kebijakan utama terkait etnis Tionghoa adalah menertibkan Kepres No 6/200 tentang pencabutan Inpres No 14/1967 yang mengatur penyelenggaraan kegaitan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat orang Tionghoa, tanpa memerlukan izin khusus.<sup>11</sup> Dengan demikian setiap upacara keagamaan, seperti Imlek, Cap Go Meh, borongsai dan lain sebagainya yang sebelumnya hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga dan dilaksanakan diruang tertutup dihapuskan. Lalu pada tanggal 19 Januari 2001 melalui Menteri Agama RI mengeuarkan keputsan No 13.2001 mengenai penetapan imlek dan hari libur fakultatif dan menghapuskan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, yang selama pemerintahan Presiden Soeharto digunakan untuk membungkam pers dan lembaga SIUPP nya.<sup>12</sup> Sebagai bentuk dukungan terhadap kehidupan masyarakat pluralis, Presiden Abdurrahman Wahid menghadiri upacara perayaan Tahun Baru Imlek bersama Majelis Tertinggi Agama Kong Hu Cu Indonesia di Jakarta. Walaupun gagal dalam menghapus aturan-aturan dsikriminatif lainnya seperti perkawinan agama Kong Hu Cu, masalah kewarganegaraan, namun keberhasilan pemerintah Presiden Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid dalam menghapus atura-aturan diskriminatif mendapat apresiasi yang sangat besar dari masyarakat Tionghoa.

Selama masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia, terjadi pelarangan dan pembatasan terhadap praktik agama Tionghoa. Banyak orang Tionghoa yang menghadapi tekanan untuk beralih agama ke agama yang diakui secara resmi oleh

---

<sup>11</sup> Choirul Mahfud, *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2013), hal.50.

<sup>12</sup> Setiono, Benny G. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. (Jakarta : Elkasa, 2002). Intan Dalam Debu volume 13.) hlm 884

negara, seperti Islam, Katolik, Protestan, dan Buddha. Klenteng, tempat ibadah tradisional orang Tionghoa, juga mengalami perubahan, di mana beberapa di antaranya diubah menjadi Vihara sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah.

Selama era Orde Baru, beberapa Klenteng dikonversi menjadi Vihara karena adanya tekanan untuk menyamakan agama Tionghoa dengan agama yang diakui oleh negara. Namun, setelah runtuhnya rezim Orde Baru, beberapa praktik dan identitas tradisional orang Tionghoa, termasuk penggunaan Klenteng dan nama-nama organisasi keagamaan seperti Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, dapat kembali diakui dan dipraktikkan.

Pengembalian penggunaan Klenteng dan pemulihan nama organisasi keagamaan setelah era Orde Baru mencerminkan perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintah terhadap keberagaman dan hak asasi manusia di Indonesia. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) merupakan suatu organisasi yang didirikan pada tahun 1961 di Jakarta, tepatnya pada masa Orde Lama di Indonesia. PITI terbentuk melalui penggabungan dua organisasi Muslim Tionghoa sebelumnya, yakni Persatuan Islam Tionghoa (PIT) dan Persatuan Muslim Tionghoa (PMT). Persatuan Islam Tionghoa (PIT) didirikan di Medan pada tahun 1953 oleh Yap A. Siong dan Haji Abdul Karim Oey. Pendiannya bersamaan dengan periode kemerdekaan Indonesia. Melalui penggabungan dengan Persatuan Muslim Tionghoa (PMT), PITI terbentuk dengan tujuan untuk menjadi wadah bagi komunitas Muslim Tionghoa dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan sosial. Keberadaan PITI mencerminkan keragaman dan pluralitas dalam konteks agama di Indonesia, di mana anggota dari latar belakang etnis Tionghoa memeluk Islam sebagai agama mereka.<sup>13</sup> Pembentukan PIT didasarkan oleh kesadaran pendiriannya, bahwa tidak ada organisasi yang secara khusus menyebarkan agama Islam dikalangan Tionghoa. Hal ini disadari betul oleh ketua umum PP Muhammadiyah, H. Ibrahim, kemudian berpesan kepada haji Karim Oey untuk menjaga saudara (etnis Tionghoa) dan merangkul saudara dari kalangan

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Benny G. Setiono  
*Sejarah Tersembunyi Orang Tionghoa di Indonesia*, (Jakarta: TransMedia Pustaka, 2008),  
hal. 112.



etnis Tionghoa untuk memeluk agama yang benar.<sup>14</sup> Pada tahun 1961 PIT dan PMT bergabung menjadi PITI (Peratuan Muslim Tionghoa Indonesia) Muslim Tionghoa ingin berbaur serius dalam kewarganegaraan. Hal ini nampak kehadiran para pengurus yang masing-masing duduk sebagai penasihat dan sekretaris. Mengingat organisasi ini merupakan kaum minoritas Tionghoa, maka diusahakan posisi strategis dipegang oleh etnis Tionghoa. Dengan demikian didalam organisasi itu sebenarnya terjadi pebmauran yang diawali dari kalangan pengurus-pengurusnya. Melalui cara ini diharapkan akan diperoleh kemudahan untuk pembauran pada anggota-anggotanya.<sup>15</sup>

Pada tahun 1967 kemudian PITI mengubah organisasinya dengan terbentuknya pengurus baru, bisa dikatakan kinerja PITI semakin terarah dan terkoordinir, kegiatan PITI pun semakin berkembang dengan pesat, dengan didirikan dewan pengurus tingkat kota, kabupaten dan provinsi diberbagai daerah di Indonesia. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang memfokuskan untuk menyebarkan dakwah dikalangan etnis Tionghoa, tampak mulai terhalang karena, penggunaan nama Tionghoa di organisasinya. Oleh karena itu pada tahun 1972, Kejaksaan Agung menghimbau kepada PITI untuk tidak lagi menggunakan nama Tionghoa, dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat, meskipun tujuan dari penggunaan nama Tionghoa untuk menarik minat etnis Tionghoa agar mengenal Islam. Dalam proses penggantian nama Persatuan Islam Tionghoa pada 5 Desember 1972, dan pada tahun itu juga bertepatan dengan tanggal 15 Desember 1972 Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dibubarkan dan anggota pengurus PITI mendirikan kembali organisasinya dengan nama Pembina Imam Tauhid Islam yang masih menggunakan singkatan awal yang sama yaitu PITI yang bergerak pada bidang Pendidikan bagi Muslim keturunan Tionghoa dengan segenap bangsa Indonesia.

Tujuan dari mendirikan PITI pada tahun 1972 yaitu memiliki tujuan:<sup>16</sup> terbentuknya masyarakat Islam dalam arti yang seluas-luasnya dalam rangka

---

<sup>14</sup> Poerwanto Hari, *Cina Khek di Singkawang* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hal. 384

<sup>15</sup> Johan Wahyudi “*Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Semarang 1986-2007*. Skripsi S1, Jurusan SKI, Fakultas Adab, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

<sup>16</sup> Dani, Sejarah PITI diwawancarai oleh Fia Dita Maspufah, Kebon Nanas Jakarta (06 Februari 2017, Pukul 15.45).

mengembangkan Indonesia, dan mewujudkan agar terlaksananya asimilasi<sup>17</sup> yang sebenarnya baik secara fisik maupun milenial. Pembina Imam Tauhid Islam dengan spesifikasi dalam bidang dakwah, diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mensukseskan program pembauran. Bagi pemerintah, islam dianggap cara yang tepat dalam melakukan pembauran secara total di masyarakat. Selain mempercepat proses asimilasi dan pembauran demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Muslim Tionghoa sendiri beragam tidak *homogen* (seragam), terutama dalam aspek ekonomi. Ada yang kalangan menengah atas dan menengah bawah, soalnya sering ada *stereotip* (umum atau wajar) kalau orang Tionghoa itu kaya secara financial. Banyak keluarga Tionghoa yang marah besar ketika anggota keluarganya masuk Islam. Ternyata semua itu bermula oleh politi *divide et empera* Belanda. Saat penjajahan Belanda, belanda membagi penduduk dalam tiga golongan. *Pertama*, golongan atas adalah orang-orang Eropa. *Kedua*, para pendatang dari Timur (India, Arab, termasuk Tionghoa). *Ketiga*, golongan yang dianggap paling rendah adalah masyarakat pribumi. Penjajahan Belanda mengusahakan tidak terjadinya persatuan antara golongan kedua dan ketiga. Salah satu caranya adalah jika ada golongan kedua, khususnya Tionghoa yang masuk Islam maka statusnya jatuh menjadi golongan ketiga. Oleh karena itu, keluarga Tionghoa yang mendapati anggotanya masuk Islam akan marah besar dan mengusir anggota keluarganya karena status mereka akan jatuh. Salah satu cara masyarakat Tionghoa akan statusnya naik adalah mengadopsi cara berpakaian dan agama orang Eropa. Oleh karena itu, saat ini banyak ditemukan masyarakat Tionghoa yang memeluk agama Kristen, Protestan atau Katolik.<sup>18</sup>

Ketertarikan orang Tionghoa terhadap Islam sehingga menjadi seorang mu'alaf harus ada pembimbingan dan pengawasa dari pihak-pihak yang memahami tentang ke Islam secara fasih, maka dari itu pergerakan dakwah tidak mungkin berjalan secara baik dan benar jika tidak dikelola dalam bentuk kelembagaan untuk mencapai suatu

---

<sup>17</sup> Menurut Koentjaraningrat, asimilasi adalah suatu proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat karena adanya perkembangan dan hubungan interaksi sosial yang terus menerus dan serius sehingga mendorong masyarakat untuk membaurkan kebudayaan yang ada untuk mengakomodasi semua pihak dalam menata bentuk keteraturan sosial yang ada.

<sup>18</sup> *Ibid. Identitas tionghoa muslim indonesia pergulatan mencari jati diri.*

tujuan yang diinginkan, maka lembaga Islam adalah wadah untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, berdiri sebagai himpunan norma-norma tentang keperluan-keperluan pokok dalam kehidupan umat Islam untuk mencapai tujuan tertentu, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.<sup>19</sup>

Perkembangan dakwah Islam hanya terjadi pada masyarakat pribumi semata, akan tetapi sudah mempengaruhi pada masyarakat Tionghoa, walaupun sebagian mereka masih terlihat antipati terhadap Islam. Gejala masuknya warga Tionghoa kedalam Islam, menurut keterangan Charles A. Coppel “*Sesungguhnya merupakan fenomena baru dikalangan warga keturunan Tionghoa masuk agama Islam, hal ini senada juga diungkapkan Suryadinata sebelum tahun 1970 an sedikit sekali warga Tionghoa yang menjadi Islam. Baru setelah tahun tersebut banyak diantara warga keturunan Tionghoa yang memeluk agama Islam.*<sup>20</sup> Yang masuk Islam setelah era tersebut bukan lagi dari kalangan menengah kebawah, tapi diminati juga oleh kalangan pengusaha, profesional, mahasiswa, dan sejumlah cendekiawan.<sup>21</sup>

Salah satu fenomena yang menarik di Indonesia pasca lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998 adalah kebebasan ekspresi individu yang berimplikasi pada munculnya organisasi masyarakat baru atau mengaktifkan kembali institusi sosial yang selama Orde Baru mengalami represi. Kemungkinan organisasi masyarakat ini dibentuk berdasarkan segmentasi tertentu, misalnya etnisitas, agama asal daerah bahkan frekuensi minat dan hobi.

Perubahan sosial budaya dan politik terjadi secara signifikan pada orang Tionghoa di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru. Gusdur mengeluarkan kebijakan revitalisasi adat istiadat dan kepercayaan Cina sekaligus mencabut Inpres No 14 Tahun 1967, adapun dalam kandungan isi pernyataan tersebut disampaikan bahwasannya intruksi presiden Soeharto terkait Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, menyatakan: bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia yang

---

<sup>19</sup> Sidi Gazalba(1983), *Islam dan Perubahan Sosiobudaya ( Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat)*, Pustaka Alhusna, Jalarta Pusat, h. 111.

<sup>20</sup> Charles A.Coppel (1994),*Tionghoa Indonesia dalam Krisis*,Judul Asli : *Indonesia Chinese In Crisis*, Penerjemah Tim PSH, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 35.

<sup>21</sup> Leo Suryadinata (1988) *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Jakarta*, Gramedia, Jakarta, h. 12.

berpusat pada negeri leluhurnya, yang dalam manifestasinya menimbulkan pengaruh psikologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap kewarganegara Indonesia sehingga merupakan hambatan proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar.<sup>22</sup>salah satu fenomena yang menarik di Indonesia pasca lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998 adalah kebebasan ekspresi yang berimplikasi pada munculnya organisasi masyarakat baru atau pengaktifan kembali institusi sosial yang selama Orde Baru mengalami represi. Kemunculan organisasi masyarakat dibentuk berdasarkan segmentasi tertentu, misalnya etnisitas, agama, asal daerah bahkan preferensi minat dan hobi.

Selama periode Orde Baru, atribut kebudayaan yang melekat dengan identitas Tionghoa harus dilepas karena dianggap memiliki tendensi kedekatan dengan paham komunis asal Cina. Salahsatu kehadiran Inpres No 14 Tahun 1967 yang melarang seluruh komunitas Tionghoa di Indonesia untuk merayakan hari-hari besar (Imlek dan Peh Cun, jugal melarang etnis ini untuk mempertunjukkan atraksi budaya (Liong, Barongsai, dan Potehi)<sup>23</sup> dihadapan publik. Pertunjukan atraksi ini hanya boleh dipertontonkan daikalangan anggota kelompok sendiri. Menilik kebelakang, sejarah kelim etnis Tionghoa di Indoensia juga semakin membuat mereka menutup diri untuk berinteraksi dalam bermasyarakat. Kategori pribumi dan non pribumi yang direproduksi selama rezim otoritas membuat etnis Tionghoa semakin mengeklusifkan diri. Akan tetapi, serangkaian usaha pembatasan ini juga diiringi dengan langkah pemerintah yang mendukung kelompok etnis Tionghoa untuk melakukan ekspansi bisnis dalam segala sektor. Kelompok etnis Tionghoa lebih mengedepankan hubungan kekerabatan inter etnis dari pada membangun relasi dengan masyarakat lokal tempat mereka bermukim. Dalam sudut pandang masyarakat lokal, kecenderungan etnis Tionghoa untuk mengeksklusifkan diri karena mayoritas etnis Tionghoa dominan dalam sektor Ekonomi.

---

<sup>22</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia Presiden Soeharto pada No 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.

<sup>23</sup> Liong adalah hewan mitologi berupa naga sebagai perlambang Dewa Kebijaksanaan, Barongsai adalah Dewa Singa yang digambarkan sebagai penguasa daratan, sedangkan potehi adalah pagelaran wayang

Pergeseran iklim politik tersebut mendorong gerak orang Tionghoa untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat, termasuk dari kalangan muslim Tionghoa yang berada dalam organisasi PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia), mereka melakukan upaya konsolidasi untuk beradaptasi sekaligus eksistensi. Kehadiran PITI sendiri dapat dilihat sebagai angin segar dalam kehidupan bermasyarakat. Organisasi ini dibentuk dengan nafas asimilasi dan mengurangi *gap* atau kesenjangan antar kelompok etnis Tionghoa dan masyarakat melalui strategi keagamaan. Bagi para anggota berupaya “menjadi Jawa” dan beragama Islam akan lebih mudah diterima di masyarakat. Meskipun demikian, kehadiran PITI juga jukan tanpa hambatan. Muslim Tionghoa dianggap sebagai minoritas dalam minoritas (*minority within minority*) dalam kelompok etnis Tionghoa. Hal ini disebabkan kelompok etnis Tionghoa dalam masyarakat berjumlah sedikit, tidak mencapai 15 persen dari populasi Indonesia pada tahun 1970. Sementara itu, pilihan menjadi uslim adalah hal yang menyulitkan bagi individu Tionghoa karena dengan menjadi *mu'alaf*, mereka disingkirkan dari keluarga besarnya. Alhasil keberadaan PITI di Indonesia pada mulanya berfokus pada pendampingan mental dan finansial anggota baru, daripada syiar agama Islam dalam masyarakat.

Penelitian ini berupaya mengulas partisipasi dan dinamika organisasi PITI di Indonesia dalam upayanya sebagai jembatan budaya (*cultural broker*) dalam masyarakat pascareformasi. Namun demikian, pada paparan awal, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah kehadiran etnis Tionghoa dan kemunculan komunitas Muslim Tionghoa di Bandung.

Berbeda dengan kota-kota dipesisir pantura Jawa lebih terbuka untuk mendatang Etnis Tionghoa. Disana ditemukan daerah pecinaan yang homogen, padat, dan jelas batasannya. Sedangkan bagi etnis Tionghoa didaerah Bandung Priangan ini, Bandung merupakan daerah terakhir yang diizinkan dapat dimasuki dan dihuni. Keadaan ini lebih meluas lagi setelah tahun 1911 ketika pemerintah Hindia Belanda mencabut semua larangan yang membatasinya. Di Kota Bandung, Etnis Tionghoa menjadi penyalur utama bagi keperluan masyarakat kota Bandung. Etnis Tionghoa yang memasuki dan menghuni wilayah Bandung membuka area perdagangan dengan

membangun toko-toko. Menurut Kustedja bahwa etnis Tionghoa di Kota Bandung mendiami suatu permukaan secara berkelompok atau berpusat disatu daerah yaitu daerah Gardujati, Cibadak, dan sekitarnya. Wilayah ini berkembang menjadi pusat perekonomian kota Bandung sampai sekarang. Nama jalan diwilayah tersebut menggunakan nama-nama yang identik dengan Tionghoa seperti, jalan Kompato Sianto, Gang Sow Tjin kie, gang Sim Tjong, gang Kam Soe, jalan Klenteng, gang tan Tie Wan, gang Lim Siong, gang Ong Toa Tin, jalan Pencinaan lama, kampung pencinaan, jalan Yun Liong. Selain berdagang, banyak etnis Tionghoa yang dipekerjakan oleh pemerintah Belanda sebagai pegawai untuk membangun gedung-gedung, seperti Gedung Sate dan pembangunan jalan kereta api.

Adaptasi Etnis Cina terhadap masyarakat Bandung sebagai keinginan yang tulus dari orang-orang yang hidup dan berkembang dalam budaya yang asing bagi mereka. Adaptasi adalah suatu proses menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan budaya. Adaptasi terhadap lingkungan fisik adalah dengan alam seperti cuaca dingin maupun panas. Adaptasi terhadap budaya terjadi seperti bahasa, prilaku, dan tradisi masyarakat. Ketika orang asing yang telah bersosialisasi ke dalam lingkungan budaya berinteraksi dengan lingkungan, itu merupakan akulturasi.<sup>24</sup> Adaptasi bagi orang asing terhadap budaya setempat merupakan suatu yang sangat sulit dilakukan, tetapi bagi seseorang yang berbakat dan kreatif maka adaptasi terhadap suatu budaya merupakan suatu keharusan dan keniscayaan guna suksesnya dalam pergaulan masyarakat.

Etnis Cina yang telah hidup beberapa generasi di Indonesia sebenarnya bukan warga asing. Akan tetapi telah terpinggirkan secara politik dan budaya membuat etnis Cina terkucilkan, sehingga mereka membutuhkan adaptasi dan akulturasi secara total terhadap budaya Indonesia. Adanya isu bahwa etnis Cina diperantauan di Indonesia mendukung ideologi komunis memperkuat hipotesis bahwa etnis Cina sebagai corong komunis sehingga terus terpinggirkan dalam kancah politik dan budaya di Indonesia. Demikian halnya dengan etnis Cina di Kota Bandung yang telah hidup ratusan tahun

---

<sup>24</sup> Gudykunst, William B., Yun Kim Young. 1992. *Communicating with Stranger, an Approach to Intercultur Communication*. USA:McGraw Hill.Inc. hlm 215

dan beberapa generasi di Bandung. Etnis Cina di Bandung hidup dan berkembang hampir semuanya dilahirkan di Bandung yang hidup dan mengalami masa remaja di Bandung umumnya merasa bahwa Bandung adalah kota kelahirannya sehingga mereka senang hidup di Kota Bandung.

Sedikitnya peneliti memaparkan 3 lembaga muslim etnis Tionghoa yang ada di kota Bandung:

*Pertama*, yayasan Al Imtizaj yang berlokasi di Jl ABC No 8, Braga, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid Al Imtizaj memiliki keunikan dari sisi arsitektur. Bangunan ini memanfaatkan bangunan bekas mal dan memiliki gaya arsitektur Tionghoa. Al Imtizaj berada di area perkantoran dan perdagangan sehingga tiap memasuki waktu shalat, shaf shalat penuh dengan para jamaah. Jamaah yang memasuki gerbang masjid akan disugui arsitektur Tionghoa. Ornamen khas Tionghoa dari bangunan masjid yaitu warna merah dan kuning namun dominan merah. Area luar dan ruang shalat juga dihiasi lampu lampion. Masjid Al Imtizaj yang dibangun tahun 2008 memiliki arsitektur Tionghoa. Salah satu aktivitas masjid tersebut yaitu memfasilitasi wagra yang ingin menjadi mu'alaf.

Masjid Al-Imtizaj ini mempunyai makna arti pembauran atau arti bahasa Tionghoa adalah Ronghe. Tujuan awal dari didirikannya masjid ini adalah untuk mempersatukan kumpulan-kumpulan orang muslim Tionghoa yang berada di Kota Bandung seperti Yayasan Pondok Mu'alaf. Masjid Al Imtizaj atau sering disebut Masjid Ronghe ini terletak di jalan ABC No 8 Braga, kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung. Masjid ini memanfaatkan sisi bangunan lama bagian gudang bangunan pusat perbelanjaan yang dahulunya dikenal dengan nama Rumah matahari dan Abdurrahman bin Auf Trade center (ATC). Masjid ini diresmikan pada tanggal 6 Agustus 2001 atas keinginan Gubernur Jawa Barat Nuriana dan dirancang oleh seorang arsitek bernama Ir. Danny Swardani. Bangunan ini didesain dengan gaya arsitektur Tionghoa dengan tujuan agar warga muslim Tionghoa pada saat itu dapat beribadah dengan nyaman dan tidak merasa asing karena mereka tetap dapat merasakan budaya mereka pada masjid ini. Arti dari Ronghe itu sendiri berarti "pembauran".

Peneliti pernah wawancara ke ketua DKM Al Imtizaj yakni H Muhammad Yahya Azlani atau panggilan akrab Ustad Yahya beliau mengatakan masjid tersebut dibangun pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2010.”Tadinya bekas Matahari Mal. Kemudian Gubernur Jawa Barat Bapak Nuriana (mantan gubernur Jawa Barat) sebagai penggerak,” katanya.<sup>25</sup> Ustad Yahya mengatakan kapasitas masjid yang memiliki dua lantai tersebut dapat menampung jamaah hingga 200 orang. Ia menuturkan aktivitas di masjid tersebut salah satunya adalah tempat bagi warga yang ingin menjadi muallaf. Namun saat ini mereka yang ingin menjadi muallaf dan bersyahadat di masjid relatif jarang. Selama bulan puasa Ramadhan 1442 h, DKM menyelenggarakan kegiatan tarawih, buka bersama, dan takjil. Namun selama masa pandemi yang berlangsung dua tahun terakhir, aktivitas selama bulan Ramadhan dikurangi. Hal ini mengacu pada kebijakan pemerintah tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

*Kedua*, Yayasan Lautze 2 yang berlokasi di Jl Tamblong No 27, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid Lautze 2 tidak jauh dari Masjid Al Imtizaj dan kurang lebih 1.4 km. Hadirnya masjid ini memberikan kontribusi yang besar terhadap warga sekitarnya, keberadaan masjid tersebut merupakan representasi dan bukti eksistensi warga muslim Tionghoa di Kota Bandung. Pada awalnya masjid ini didirikan seorang muallaf Tionghoa bernama Oei Tjeng Hien atau biasa dikenal dengan nama Haji Karim Oei mendirikan Lautze sebagai wadah informasi bagi etnis Tionghoa. Yayasan Karim Oei mendirikan Masjid Lautze 1 di daerah Pecinaan di Jakarta pada tahun 1991. Sadar penyebaran informasi tidak hanya bisa di satu tempat, kemudian Haji Karim mendirikan di kota lainnya yang tidak lain adalah kota Bandung pada tahun 1997.

Yayasan Haji Karim Oei dan Masjid Lautze boleh dibilang menjadi tonggak bersejarah dalam membina dan merangkul kalangan Cina yang ingin mendekatkan diri terhadap Islam. Kiprah yayasan ini memiliki andil besar dalam bidang pembinaan, pendampingan, serta edukasi kepada komunitas Cina yang ada di Indonesia. Yayasan Haji Karim Oei yang terinspirasi dari kiprah Haji Abdul Karim Oei Tjeng Hien ini

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan DKM Masjid Al Imtizaj. Rabu, 30 November 2022



berdiri sejak 1988 dan melakukan pembinaan dakwah secara sosial dan ekonomipun dapat dilihat dari organisasi yang didirikan kala itu, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia.

Sekilas orang tidak akan menyangka sebuah bangunan ruko di jalan Tamblong adalah sebuah masjid. Bangunannya memang masih berupa ruko dengan cat merah menyala. Jika diperhatikan lebih jeli, dekorasi Masjid tersebut menyerupai Klenteng. Akulturasi yang terdapat didalam bangunan ibadah sangat jarang ditemukan, hal tersebut dikarenakan Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai macam suku dan budaya yang masing-masing memiliki struktur budaya yang berbeda.<sup>26</sup> Kontak budaya dengan bangsa Cina dibuktikan melalui bukti-bukti antropologis bahwa kontak tersebut sudah berlangsung selama berabad-abad. Salah satu contoh dari bukti tersebut adalah dengan adanya Masjid yang berada di Kota Bandung, yaitu Masjid Al Imtaz dan Masjid Lautze. Keduanya sama-sama mempunyai bangunan arsitektur yang khas yang dimiliki budaya di Tionghoa.

Kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Lautze 2 Bandung, aktivitas utama yaitu pendampingan muallaf untuk bermacam-macam etnis yang ingin tau lebih dalam tentang agama Islam serta data tentang Islam. Para muallaf ataupun seseorang yang ingin tau Islam hendak merasa tidak aman kala merambah masjid terlebih bertanya tentang Islam. Hal ini yang menjadikan Masjid Lautze 2 terletak ditengah warga serta terbuka untuk siapa saja, bukan hanya muslim namun tiap orang tanpa memandang suku, bangsa, agama, serta keyakinan yang ingin memahami Islam lebih jauh. Masjid Lautze 2 melayani bermacam etnis walaupun yang sangat banyak merupakan etnis Tionghoa.

Pada bulan Ramadhan, masjid Lautze mempunyai sekian banyak aktivitas berbentuk ngabuburit tiap hari dari waktu habis ashar sampai maghrib, buka bersama, ta'jil on the road, shalat tarawih, dan belajar Al-Qur'an Ramadhan, Masjid Lautze pula

---

<sup>26</sup> Ketut Gunawan and Yohanes Rante, "Manajemen Konflik Atasi Dampak Masyarakat Multikultural Di Indonesia," *Jurnal Mitra Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 2, no. 2 (2011): 212–24.

melakukan pembagian zakat fitrah, infaq serta sodaqah bagi fakir miskin, dan shalat Idul Fitri.<sup>27</sup>

Peneliti mewawancari ke penjaga Masjid Lauze 2 yakni Bapak Fauzan beliau mengatakan.”Jika dilihat masjid ini cenderung tertutup karena situasinya yang berada di pinggir jalan utama, masjid Lautze berbenah dan berupaya memberikan layanan publik yang maksimal bagi mereka yang membutuhkan informasi Islam dengan pendekatan budaya Tionghoa”.<sup>28</sup> Semua orang bisa keluar masuk ketika hendak beribadah. Namun tidak jarang juga kedatangan nun muslim yang hadir. Sangat jelas di masjid ini terdapat banyak yang datang untuk menanyakan apa itu Islam dan artinya bahwa non muslim pun tidak sungkan untuk hadir kesana.

*Ketiga*, yayasan Pondok Mualaf Indonesia yang berlokasi di Jl Padat Karya 10 Kel Cibeber Kecamatan Cibeber Selatan Kota Cimahi. Jawa Barat. Yayasan Pondok Mualaf Indonesia baru-baru ini telah melakukan kerjasama dengan wakaf Salman ITB. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Wakaf Salman ITB yaitu M Khirzan Nazar Noe'man dan Ketua Umum Yayasan Pondok Mualaf Indonesia yaitu Ustad Ku Wi Han. Ustad Ku Wie Han mengenal Islam semenjak SMA dan memutuskan masuk Islam pada tahun 1988 tepatnya pada usia 18 tahun. Ustad Ku Wie Han masuk Islam mendapatkan arahan dari Pamannya melalui yayasan PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia)

Untuk melihat relasi minoritas Tionghoa Muslim dengan etnis jawa dan lainnya yang berada di kota Bandung, untuk itu peneliti menggunakan teori kritis dari seorang yang bernama yaitu Axel Honneth. Pada teori terakhir inilah, dapat dimengerti bahwa etnis Tionghoa Muslim sebagai minoritasnya minoritas berupaya untuk mendapatkan pengakuan dari saudara sebangsanya, sebab dengan begitu kewarganegaraannya dapat diakui dan segala hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah setara. Oleh karenanya, dengan menggunakan teori pengakuan Axel Honeth ini,

---

<sup>27</sup>Mardotillah, Mila, Amin Hendro, Rini Soemarwoto, and Ardini Raksanagara. “Peran Masjid Lautze 2 Bandung Dalam Dakwah Dan Budaya.” *Khazanah Theologia* 2, no. 1 (2020): 9–22.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Penjaga Masjid Lautze 2. Selasa, 3 Januari 2023

peneliti akan mencoba menelisik upaya perjuangan etnis Tionghoa Muslim di Bandung untuk memperoleh pengakuan.

Alasan memilih teori ini adalah penyesuaian dengan fokus kajian, yaitu upaya yang dilakukan oleh etnis Tionghoa Muslim, sebagai minoritas dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Upaya yang dilakukan oleh etnis Tionghoa Muslim di Bandung agar terhindar dari segala macam bentuk diskriminasi dan memperoleh haknya secara utuh dapat difasilitasi oleh teori pengakuan Axel Honeth karena konteks yang terjadi bagi golongan minoritas yaitu kekerasan dan diskriminasi.

Didalam bukunya yang berjudul *The Struggle for Recognition: Moral Grammar of Social Conflicts*. Honneth menggunakan konsep pengakuan (*recognition*) dalam arti yang digunakan oleh Hegel. Honneth juga banyak menggunakan teori yang dikembangkan oleh George Herbert Mead, seorang psikolog sosial. Terdapat pula pengaruh teori komunikasi yang dikembangkan Habermas juga sangat terasa di dalam karya-karya Honneth.

Honneth sendiri kemudian membangun teorinya dengan mendasarkan pada tiga bentuk pengakuan timbal balik yang beranjak dari teori Hegel, disamping terpengaruh pemikir lainnya yaitu Herbert Mead (psikologi sosial). Adapun yang dimaksud timbal balik *pertama*, yakni cinta (*love*) yang mengandaikan antar-subjek dapat saling menerima dan mengakui satu sama lain; *kedua*, adanya penghormatan (*respect*) antar masing-masing subjek, dan dalam bentuk hak-hak yang bersifat legal; *ketiga*, yakni terbentuknya solidaritas (*solidarity*), tentu saja ketika masing-masing subjek dapat mengenali, menghormati dan adanya sikap menerima” kekhasan ataupun identitas dari masing-masing subjek.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan dari latar belakang diatas, maka objek yang disampaikan itu meliputi “Kehidupan Sosial Keagamaan Muslim Tionghoa di Kota Bandung 1966-2020”

1. Bagaimana awal mula hingga perkembangan Tionghoa di Kota Bandung ?
2. Bagaimana sejarah Muslim Tionghoa ?
3. Bagaimana Relasi muslim Tionghoa di Kota Bandung ?
4. Bagaimana komunitas kelembagaan muslim Tionghoa kota Bandung Jawa Barat?

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya untuk peneliti dan umumnya bagi para peminat baca yang tertarik akan kajian yang peneliti uraikan dalam Tesis ini. Adapun tujuan dari penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memahami awal mula hingga perkembangan Tionghoa di Kota Bandung ?
2. Untuk memahami sejarah Muslim Tionghoa ?
3. Untuk memahami relasi muslim Tionghoa di Kota Bandung ?
4. Untuk memahami komunitas kelembagaan muslim Tionghoa kota Bandung Jawa Barat?

## **C. Tinjauan Pustaka**

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu, secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yakni yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan karena data yang diperoleh dari hasil penelitian itu adalah data yang benar-benar baru dan sebelumnya belum pernah ada.

Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. pengembangan, hasil dari penelitian merupakan pendalaman dan perluasan pengetahuan yang telah ada.

Tulisan pertama ialah Menjadi Muslim Tionghoa: Studi Problematika Keberagaman Minoritas Muslim di Jember karya tulis tesis yang disusun oleh Muhammad Ali Harozim di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq. Adapun

isi yang dimuat dalam karya tulis tersebut mengenai tentang, asal mula muslim tionghoa di Jember, organisasi PITI di Jember dan bagaimana respon masyarakat dan pemerintah terhadap gerakan dari komunitas etnis Tionghoa di Jember. Adapun karya ilmiah yang kedua yaitu Dakwah Persuasif pada Mualaaf Etnis Tionghoa: Study pada Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Surabaya yang disusun oleh Siti Nur Alfiana Wulandari yang memuat tentang cara dakwah persuasif pada Mualaf etnis Tionghoa berdasarkan pada teori penetrasi Sosial, serta para mualaf dalam mengamalkan dakwah berdasarkan penetrasi sosial.

#### **D. Metode Penelitian**

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode penelitian fenomenologis, yaitu penelitian yang menganggap setiap situasi, lingkungan, atau peristiwa merupakan potensi yang menarik untuk diteliti.<sup>29</sup> Pendekatan fenomenologi berkonsentrasi pada pengalaman pribadi termasuk bagian dari individu “individu yang ada saling memberikan pengalaman satu sama lain. Pada dasarnya fenomenologi adalah suatu tradisi pengkajian yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman manusia. Metode penelitian sejarah memiliki 4 tahapan seperti, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Metode penelitian sejarah dalam hal ini dapat dijelaskan pada setiap prosesnya, sebagai berikut:

##### **1. Heuristik**

Pada tahap pertama ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan topik yang akan dibahas. Adapun langkah-langkah penelitian ini pertama-tama yang dilakukan dengan pengumpulan data mulai dari studi kepustakaan dan kearsipan. Sedangkan sumber-sumber sekunder didapatkan dari berbagai monografi yang membahas tema-tema yang berkaitan dengan tulisan ini.

Pengumpulan data dilakukan secara rinci dengan mengungkap data dan fakta secara alamiah dengan metode pendekatan sejarah, sosiologi, antropologi,

---

<sup>29</sup> Basuki, Sulistyono. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

politik dan agama.<sup>30</sup> Dengan demikian penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan dengan riset kualitatif.

- a. Sumber primer adalah kesaksian seseorang yang terlibat langsung pada peristiwa tersebut.<sup>31</sup> Atau alat mekanis yang hadir pada peristiwa tersebut, misalnya: kamera, mesin ketik, alat tulis dan kertas. Sumber primer harus sezaman dengan peristiwa yang dikisahkan.

Dalam metode penelitian tentang “Kehidupan Sosial Keagamaan Muslim Tionghoa di Kota Bandung 1966-20”. Peneliti mengambil kutipan-kutipan yang ada pada buku, jurnal, skripsi, tesis dan media visual. Pembahasan yang tertuang dalam laporan tersebut bisa dikatakan bahwa sumber yang peneliti gunakan yaitu sumber primer kuat dan tidak kuat, diantaranya sebagai berikut:

#### **1) Sumber Audio Visual**

- a) Wawancara dengan H. Muhamad Yahya Azlani, S A.g selaku DKM masjid Al-Imtizaj (Ronghe-Pembaوران)
- b) Wawancara dengan Ustad Ku Wie Han selaku ketua Yayasan Pondok Muallaf Indonesia
- c) Wawancara dengan Abah Otong Hambali selaku Ketua Pengawas Yayasan Masjid Lautze 2 Kota Bandung
- d) Wawancara dengan Bapak Paulus Lie selaku Anggota Pengawas Yayasan Masjid Lautze 2 Kota Bandung
- e) Wawancara dengan Bapak Hendro selaku Ketua Pengawas Yayasan Masjid Lautze 2 Kota Bandung
- f) Wawancara dengan Ustad Rahmat Nugraha selaku Sekretaris Masjid Lautze 2 Kota Bandung
- g) Wawancara dengan Koko James selaku Muallaf dan jamaah dari Masjid Lautze 2 Kota Bandung

---

<sup>30</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Yayasan Bandung Budaya. 1997) hlm

<sup>31</sup> Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia. 2014) hlm 96

- h) Wawancara dengan Koko Aris selaku Mualaf dan jamaah dari Pondok Mualaf Indonesia Kota Bandung
- i) Wawancara dengan Cici selaku Mualaf dan jamaah dari Pondok Mualaf Indonesia Kota Bandung
- j) Wawancara dengan Bapak Fauzan selaku penjaga Masjid Lautze kota Bandung
- k) Wawancara dengan Bapak Agus selaku petugas MUI dari bagian Humas

**2) Sumber Photo**

- a) Photo kegiatan keagamaan harian di Masjid Lautze
- b) Photo kegiatan keagamaan harian di Masjid Al Imtizaj
- c) Photo kegiatan keagamaan harian di Yayasan Pondok Mualaf
- d) Photo seorang mualaf akan bersyahadat
- e) Photo peneliti bersama para narasumber dari para Mu'alaf

**3) Sumber Video**

- a) Video proses mualaf akan mengucapkan syahadat
- b) Video kegiatan keagamaan para mualaf Tionghoa
- c) Video orang non muslim sedang konsultasi tentang Islam

**4) Sumber Tertulis**

- a) Sertifikat pernyataan masuk Islam dari Yayasan Lau Tze
- b) Sertifikat pernyataan masuk Islam dari Yayasan Pondok Mualaf Indonesia
- c) Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Mualaf Indonesia
- d) Akte tentang truktur dan pengurus yayasan Masjid Lau Tze dua Bandung

- b. Sumber sekunder adalah kesaksian dari seseorang yang bukan merupakan saksi pandang mata, yaitu seseorang yang bukan hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Dalam sumber sekunder, peneliti menggabungkan sumber-sumber yang berhubungan dengan objek

penelitian “Kehidupan Sosial Keagamaan Muslim Tionghoa di Kota Bandung 1966-2020”. Peneliti mendapatkan sumber sekunder dari berbagai tempat antara lain: Perpustakaan daerah, Perpustakaan Universitas Islam negeri Bandung, buku-buku, jurnal, tesis, disertasi yang berhubungan dengan objek penelitian:

1) Sumber Buku

- a) Afthonul Afif. *Identitas tionghoa muslim indonesia pergulatan mencari jati diri*. (Depok: Penerbit Kepik.2012)
- b) Amen Budiman, *Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia*. Semarang: Satya Wacana.1979)
- c) Al-Qurtuby Sumanto. *Arus Cina-Islam-Jawa*. (Semarang: Elsa ress 2017)
- d) Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politi : Mengungkap Fakta Sejarah Tersembunyi Orang Tionghoa di Indonesia*, (Jakarta: TransMedia Pustaka, 2008)
- e) Choirul Mahfud, *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2013)
- f) Charles A.Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Judul Asli : *Indonesia Chinese In Crisis*, Penerjemah Tim PSH, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1994)
- g) Drs. H. Junus Jahja, *Asimilasi Islam*. (Jakarta: Badan Komunikasi Penghayat Kesatuan Bangsa. 1981)
- h) Dr. The Siauw Giap, *Cinta Muslim di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Ukhwah Islamiyah. 1986)
- i) De Graff, H.J. *Cina Muslim di Jawa Abad XV & XVI, Antara Historisitas dan Mitos*. (Yogyakarta : Tiara Wacana 2004)
- j) Jusuf, Teddy. *Sekilas Budaya Tionghoa di Indonesia*. (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.2000)



- k) Kong Yuangzi dalam I Wibowo dan Syamsul Hadi, *Merangkul Cina : Hubungan Cina Indonesia Pasca Soeharto*, (Jakarta: Gramedia Pustaka 2009)
- l) Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, (Grafiti Pers, 1984)
- m) M. Ikhsan dkk, *Menghidupkan kembali Jalur Sutera Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka,2001)
- n) Misbah Zulfa Elizabeth, *Cina Muslim (Studi Etnoscience Keberagaman Cina Muslim)*. (Semarang)
- o) Ong Hok Ham. *Riwayat Tionghoa peranakan di Jawa*.(Depok:Komunitas Bambu 2017)
- p) Perkasa, Adrian. 2012. *Orang-Orang Tionghoa Dan Islam Di Majapahit*. (Yogjakarta: Pustaka Ombak 2012)
- q) Poerwanto Hari, *Cina Khek di Singkawang* (Depok: Komunitas Bambu, 2014)
- r) Setiono, Benny G. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. (Jakarta : Elkasa, 2002. Intan Dalam Debu volume 13.)
- s) Sidi Gazalba, *Islam dan Perobahan Sosiobudaya ( Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat)* (Jakarta:Pustaka Alhusna. 1984)
- t) Suryadinata, Leo. *Negara dan Etnis Tionghoa (Kasus Indonesia)*. (Jakarta : Pustaka LP3ES 2002)
- u) Tan, Mely G. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia, Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*. (Jakarta : PT Gramedia.1998)
- v) Victor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, Second Edition Oxford University Press, (Kuala Lumpur, 1981)
- w) Willian G, Skinner, *The Cinese Minority dalam Ruth T. McVey (ed), Indonesia* (New Haven:Southeast Asia Study, Yale University, 1963)

- x) Ketut Gunawan and Yohanes Rante, “Manajemen Konflik Atasi Dampak Masyarakat Multikultural Di Indonesia,” *Jurnal Mitra Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 2, no. 2 (2011)
- y) Mardotillah, Mila, Amin Hendro, Rini Soemarwoto, and Ardini Raksanagara. “Peran Masjid Lautze 2 Bandung Dalam Dakwah Dan Budaya.” *Khazanah Theologia* 2, no. 1 (2020)

## 2. Tahapan Kritik

Kritik sumber dapat dibagi dalam dua bagian yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah kritik yang ingin melihat keaslian atau orsinalitas dari sumber.<sup>32</sup>Jadi kritik ini lebih bersifat fisik, bukan isi dari sumber tersebut. Kalau kita menemukan sumber tertulis, kritik eksternal yang kita lakukan adalah melihat jenis kertasnya, jenis tulisannya, jenis hurufnya. Kritik dilakukan oleh sejarawan manakala sumber-sumber sejarah telah dikumpulkan. Bisa dikatakan proses kedua ini adalah proses penyeleksian sumber. Sumber itu banyak dan harus diseleksi sesuai kebutuhan sejarawan. Proses kritik meliputi dua macam yaitu kritik eksternal dan internal.

Pada tahapan kritik, sumber dikumpulkan pada kegiatan heursitik yang berupa buku-buku yang relevan dengan pembahasan yang tertarik ataupun hasil temuan dilapangan tentang bukti-bukti pembahasan atau topik utama dalam penelitian. Tahapan kritik tentu memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya dan salah satunya bersifat keaslian.

Pada tahapan kritik Intern (kredibelitas) yaitu dilakukan dengan cara memperbandingkan dari sumber-sumber yang didapatkan, adapun dari perbandingan tersebut yaitu berupa tempat kejadian, pelaku, kronologis waktu dan lain-lainn. Sedangkan kritik ekstern (otensitas) ini dilakukan dengan pengujian sumber-sumber yang asli ataupun sumber yang sudah melalui tahap perbaharuan pada edisi. Tujuan krikitik adalah untuk menyeleksi data menjadi fakta. Dengan demikian sumber akan diuji untuk mengetahui hal tersebut,

---

<sup>32</sup> Garraghan, Gilbert J. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University, 1957.

peneliti akan melakukan uji untuk memperkuat atau membandingkan antara satu sumber dengan sumber-sumber lainnya.

**a. Kritik Eksternal**

Kritik eksternal wajib dilakukan oleh sejarawan untuk mengetahui otentisitas atau keaslian sumber. Sebagaimana yang disarankan oleh istilahnya, kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” sumber sejarah.<sup>33</sup> Sebelum semua kesaksian yang berhasil dikumpulkan oleh sejarawan dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lalu, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan yang ketat.

**b. Kritik internal**

Kebalikan dari kritik eksternal, kritik internal sebagaimana yang disarankan oleh istilahnya menekankan aspek “dalam” yaitu “isi” dari sumber: kesaksian (*testimoni*). Setelah fakta kesaksian (*fact of testimoni*) ditegakkan melalui kritik eksternal, tiba giliran sejarawan untuk mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu. Ia harus memutuskan apakah kesaksian itu dapat diandalkan (*reliable*) atau tidak. Keputusan ini didasarkan atas penemuan dua penyidikan (*inkuiri*).

**3. Tahapan Interpretasi**

Tahapan interpretasi ini ialah bagaimana seorang sejarawan bisa menafsirkan masa lalu dengan bukti-bukti yang telah tertuang dari berbagai sumber yang telah tertulis. Tidak ada masa lalu dalam konteks sejarah yang aktual karena yang ada hanyalah interpretasi historis. Persoalan krusial adalah sulitnya menemukan kembali kehidupan masa yang berlalu. Skema interpretasi ini dibuat dalam rangka memenuhi kekuatan analisis mengenai Kehidupan Sosial Keagamaan Muslim Tionghoa di Kota Bandung 1966-2020.

Untuk memahami dan mendalami objek yang terkait langsung dengan latar belakang, baik dari proses biografi, kronologis, pendidikan, pemikiran, dan

---

<sup>33</sup> Lubis, Nina Herlina. *Metode Sejarah*. Edisi Revisi, cetakan ketiga. Jawa Barat: YMSI, 2014.

kondisi sosial yang ada pada kehidupannya. Dengan demikian, perlu diinterpretasikan oleh sejarawan dari cara persepsi dan konsepnya, intelektual berupa pengalaman yang menghasilkan pandangan hidup berdasarkan pada data-data yang sudah ada.

#### **4. Tahapan Historiografi**

Tahapan terakhir dari metode penelitian sejarah adalah Historiografi. Historiografi sendiri dapat diartikan menuliskan hasil dari penafsiran data-data sejarah kedalam sebuah tulisan dekskriptif dengan menggunakan susunan bahasa dan format penelitian yang baik dan benar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan sejarah. *Pertama*, penyeleksian atas fakta-fakta, untaian fakta-fakta yang dipilih harus berdasarkan dua kriteria. *Pertama*, relevansi peristiwa-peristiwa dan kelayakannya. Kedua, imajinasi yang digunakan untuk merangkai fakta-fakta yang dimaksudkan untuk merumuskan suatu hipotesis. *Ketiga*, kronologis peneliti menuangkan segala fakta-fakta yang ditemukannya dituangkan kedalam bentuk tulisan secara runtut.

Penelitian sejarah atau historiografi merupakan tahapan akhir dalam peneliti sejarah. Interpretasi dari data dan fakta yang peneliti dapatkan dari sumber-sumber yang kemudian ditulis hingga membentuk tulisan sejarah. Dalam tahapan ini peneliti dituntut untuk mencari data-data yang tersembunyi dan kemudian ditulis menghasilkan tulisan sejarah.